

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak berdiri pertama kali tahun 1992, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Dalam dekade terakhir ini, perbankan syariah memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 33,2%, dan itu merupakan prestasi yang cukup menggembirakan bagi industri perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Selain itu, aset perbankan syariah yang terus meningkat sejak awal berdirinya tahun 1992 mampu menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke 9 sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Meskipun dari aspek pertumbuhan rata-rata perbankan syariah cukup bagus, akan tetapi keberhasilan suatu industri perbankan tidak cukup hanya dilihat dari sisi aset, ada satu aspek yang cukup mengecewakan bagi industri perbankan syariah, yaitu aspek *market share*. Hingga saat ini perbankan syariah belum bisa menembus bahkan menyamai *market share* perbankan konvensional, *market share* perbankan syariah hanya mencapai 5% dari seluruh *market share* perbankan nasional, meski usia perbankan syariah sudah 2 dekade lebih (Ifham, 2015, p. 12). Belum cukup sampai disitu, perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat dari awal berdiri hingga pertengahan dekade ini ternyata tidak berlanjut secara konsisten, terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam tiga tahun terakhir ini, yaitu pertumbuhan perbankan syariah dari segi aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga yang mengalami penurunan cukup signifikan, bahkan di tahun 2014 pertumbuhan perbankan syariah hanya mencapai 12% (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Tentu saja perkembangan perbankan syariah yang sedang bermasalah di akhir dekade ini menjadi sesuatu yang layak untuk dipertanyakan. Pertumbuhan yang menurun dan *market share* yang sangat kecil menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Apabila kita melihat definisi

bank itu sendiri, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016, p. 13) dan pernyataan bahwa perbankan syariah membutuhkan kepercayaan, karena memang bisnis itu adalah sebuah bisnis kepercayaan (Antonio, Adnan, Triyuwono, Muhammad, & Dumairy, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan, 2004, p. 79) maka dapat disimpulkan bahwa bank menjual jasa keuangan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan aset sekaligus *market share* perbankan yang dibutuhkan adalah kepercayaan masyarakat, dan jika pada kenyataannya *market share* masih kecil dan pertumbuhan menurun, maka penyebabnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih kurang, dalam artian sebagian masyarakat masih memiliki persepsi buruk terhadap bank syariah, sehingga tidak mempercayakan dana mereka kepada bank syariah dan dapat disimpulkan bahwa ada stigma di perbankan syariah.

Memperkuat pernyataan tersebut, dalam Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019 yang dirilis oleh OJK menyebutkan ada 7 isu yang signifikan bagi perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015, p. 20) yaitu:

1. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah
 2. Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah
 3. Biaya dana yang mahal berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan
 4. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat
 5. Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum memadai serta Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan
 6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah
 7. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal
-

Dari 7 isu perbankan syariah diatas, poin ke 4 merupakan poin yang cukup signifikan terkait isu perbankan syariah. Hal tersebut didukung oleh penelitian pada tahun 2015 tentang *Pengaruh Kualitas Produk dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Muamalat Indonesia*, yang hasilnya menyatakan bahwa kualitas produk mempengaruhi sebesar 17,7% terhadap minat nasabah menabung di Bank syariah (Hapsari, Handoyo, & Widayanto, 2015), hal ini menunjukkan bahwa produk mempunyai pengaruh dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat, selain itu berkenaan dengan pelayanan, dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Isfi Sholihah (2015) dalam jurnal yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur* yang memberikan hasil bahwa variabel pelayanan merupakan variabel utama yang memberikan kontribusi paling besar dalam hubungannya dengan hasil persepsi masyarakat tentang perbankan syariah (Sholihah, 2015), ditambah lagi dengan pernyataan OJK bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah masih sangat kurang, jangkakan perbankan syariah, pemahaman terhadap perbankan saja menurut survey OJK tahun 2013 hanya 22,7 % masyarakat Indonesia yang paham terhadap sistem perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Berangkat dari permasalahan tersebut, sebagaimana yang sudah banyak diketahui bahwa pusat perekonomian khususnya perbankan di Indonesia adalah terpusat di pulau Jawa, dalam Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh OJK pada Juli 2016 lalu disebutkan bahwa di pulau jawa terdapat 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari ke enam provinsi tersebut, ternyata yang memiliki kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) paling sedikit adalah provinsi DI Yogyakarta (Otoritas Jasa Keuangan, 2016, p. 6).

Bukan hanya jumlah kantor, dari segi aset ternyata provinsi DI Yogyakarta juga menjadi provinsi dengan aset terkecil diantara 5 provinsi besar lain di pulau Jawa (Otoritas Jasa Keuangan, 2016, p. 71). Apabila dilihat lebih jauh, dari data Statistik Perbankan Syariah Juli 2016, yang merilis aset perbankan

syariah per kota/kabupaten ternyata aset perbankan syariah di provinsi DI Yogyakarta hanya terkumpul di kota Yogyakarta (Otoritas Jasa Keuangan, 2016, p. 72).

Dari pemaparan sebelumnya terlihat jelas bahwa perbankan syariah di provinsi DI Yogyakarta hanya berkembang di kota Yogyakarta, adapun eksistensi perbankan syariah di Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul masih perlu dipertanyakan. Disamping itu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa diantara beberapa kabupaten/kota di Yogyakarta Slemanlah yang memiliki penduduk terbanyak di DI Yogyakarta yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.167.481 Jiwa (Badan Pusat Statistik, 2016). Berbicara tentang pangsa pasar perbankan syariah di Sleman, tentunya salah satu sasaran utamanya adalah tenaga kerja yang ada di kabupaten Sleman, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman merilis daftar profesi kerja berdasarkan sektornya dengan profesi terbanyak yaitu sebagai petani, kemudian sektor jasa-jasa masyarakat, sektor pedagang, dan sektor lembaga keuangan. Dalam penelitian ini sektor-sektor tersebut akan dijadikan sampel dengan metode *cluster sampling*, dan klaster yang digunakan adalah klaster pekerjaan sesuai dengan tenaga kerja mayoritas di Sleman yang diambil dari sektor-sektor terbanyak meliputi beberapa pekerjaan yaitu petani, dosen, pedagang dan praktisi lembaga keuangan. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan topik penelitian di kabupaten Sleman dengan judul “**STIGMA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Tenaga Kerja Kabupaten Sleman)**”

B. Rumusan Masalah

Perbankan syariah yang diprakarsai oleh bank Muamalat pada tahun 1992 memiliki pertumbuhan yang cukup baik dalam beberapa tahun setelahnya, akan tetapi 3 tahun terakhir ini mulai mengalami penurunan tingkat pertumbuhan, pangsa pasar perbankan syariah juga hanya berkutat di posisi 5%. Hal tersebut terjadi salah satunya karena pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Hadirnya perbankan syariah di

Indonesia cukup menghadirkan banyak respon dari masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga para eksekutif, ada yang pro dan ada yang kontra, berbagai macam persepsi bermunculan termasuk persepsi negatif dari masyarakat, sehingga munculnya stigma terhadap perbankan syariah tidak bisa terelakkan lagi.

Oleh karena itu, ada beberapa aspek dalam perbankan syariah yang perlu diteliti apakah memiliki respon dan persepsi yang baik atau buruk dari masyarakat khususnya bagi tenaga kerja yang merupakan orang yang memiliki penghasilan sehingga berpotensi untuk menjadi nasabah perbankan syariah.. Dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana stigma tenaga kerja kabupaten Sleman terhadap produk perbankan syariah?
2. Bagaimana stigma tenaga kerja kabupaten Sleman terhadap pelayanan perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis stigma tenaga kerja kabupaten Sleman terhadap produk perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis stigma tenaga kerja kabupaten Sleman terhadap pelayanan perbankan syariah..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini dapat menunjukkan stigma yang diberikan tenaga kerja kabupaten Sleman terhadap produk dan pelayanan perbankan syariah.
 2. Bagi praktisi penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan langkah awal penentuan kebijakan baik dalam produk maupun pelayanan sebagai langkah
-

dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan perbankan syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam 5 bab yang saling berkaitan sebagai acuan berpikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan adapun penjelasan lebih lanjut beserta teori yang melandasi akan dibahas di bab II.

Bab II adalah telaah pustaka dan landasan teori bab ini berisikan *literature review* yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya kemudian Landasan Teori yang berisi penjelasan secara mendetail tentang permasalahan yang dipaparkan pada bab I dengan disertai teori-teori mengenai variabel dalam penelitian ini beserta Indikator-indikatornya adapun selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini akan dibahas di bab III.

Setelah dipaparkan teori yang melandasi permasalahan dan penjelasan masing-masing variabel maka dibahas dalam bab III tentang metode penelitian yang berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan, bagaimana metodenya, tempat penelitian, obyek penelitian, waktu penelitian, populasi, sampel dan metode sampling yang dilakukan. Adapun setelah ditentukan metode penelitiannya maka analisis data akan dibahas di bab IV.

Analisis data dan pembahasan yang berisikan pembahasan tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah. Adapun kesimpulan dan saran dari pembahasan dan hasil penelitian akan dibahas di bab V.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dan saran-saran untuk riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

